

# TRANSFORMASI KONFLIK PAPUA

Neles Tebay

82

**Abstract:** This article deals with the Papua conflict occurred between the Jakarta-based Government of Indonesia and the Indigenous Papuans living in Papua and West Papua provinces. The vertical conflict begun in 1963, the year the half of western part of the Island of New Guinea was incorporated into the Republic of Indonesia. It has brought about a lot of damages. The government, without consultation with the Papuans, has adopted several policies, but as of today the conflict remains unsettled yet. In seeking to resolve the conflict, this article proposes a conflict transformation approach. This approach will allow all stakeholders to actively participate in determining a policy that addresses both the conflict and its root causes. The article describes some indicators and the nature of the Papua conflict, explores the concept of conflict transformation, presents the role of dialogue, identifies stakeholders, and proposes five phases of dialogue process to peacefully resolve the conflict.

**Keywords:** konflik • transformasi konflik • perdamaian • tanah damai • dialog •

Konflik Papua sudah berlangsung lama sejak 1963 dan masih berlangsung hingga kini.<sup>1</sup> Konflik ini mempunyai dimensi destruktif sehingga telah menelan banyak korban. Dimensi destruktif perlu dirubah menjadi konstruktif, suatu proses transformasi konflik.<sup>2</sup> Dalam proses transformasi konflik Papua, dialog dapat digunakan sebagai wadah yang esensial untuk berupaya memperbaiki relasi yang telah dirusakkan oleh konflik antara Papua dan Jakarta. Artikel ini akan menggambarkan adanya konflik antara Papua dan Jakarta, mendalami konsep tentang transformasi konflik Papua, memaparkan kedudukan dan pentingnya dialog dalam upaya mengubah dimensi destruktif menjadi dimensi konstruktif, menegaskan pentingnya partisipasi semua pemangku

---

<sup>1</sup> Pembahasan tentang konflik Papua secara menyeluruh dan komprehensif, lihat Muridan (*et al*), 2009.

<sup>2</sup> Konsep transformasi konflik yang digunakan dalam tulisan ini didasarkan pada ulasan dari Lederach, 2003.

kepentingan, dan menawarkan lima tahap dialog untuk membantu proses transformasi konflik Papua.

### **Indikator Adanya Konflik Papua**

Konflik Papua masih belum diselesaikan secara tuntas. Sejumlah peristiwa dapat dijadikan cerminan atau indikator dari konflik Papua yang sudah berlangsung selama lima dekade. Apa indikator dari konflik Papua?

Pertama, masih terjadinya penembakan. Media cetak dan elektronik baik di Tanah Papua maupun di tingkat nasional masih menyiarkan berita tentang penembakan yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Ada penembakan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) yang merupakan sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Ada pula penembakan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terhadap orang-orang Papua yang dipandang sebagai separatis, yang merupakan musuh negara Indonesia. Ada pula penembakan yang dilakukan oleh penembak misterius, yang oleh pihak kepolisian disebut sebagai Orang Tak diKenal (OTK). Berbagai peristiwa penembakan tersebut, tidak hanya menciptakan suasana teror tetapi juga telah mengakibatkan jatuhnya korban, baik di pihak warga sipil maupun di pihak TNI dan POLRI. Mengingat banyaknya korban yang tewas karena penembakan selama 50 tahun, maka Tanah Papua seringkali disebut sebagai Ladang Pembantaian (*a killing ground*).

Kedua, masih aktifnya perlawanan TPN/OPM terhadap pemerintah Indonesia yang dipandang sebagai penjajah. TPN masih melakukan perlawanan di hutan belantara Papua hingga kini.<sup>3</sup> Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk operasi militer, untuk membasmi keberadaan TPN/OPM, tetapi terbukti tidak berhasil. TPN/OPM, kini, disebut Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Keberadaan TPN ini telah

---

<sup>3</sup> Sebagai contoh, kami sebutkan tiga kasus yang memperlihatkan bahwa TPN masih aktif melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Pertama, TPN menyerang pos Polisi dan mengambil 8 pucuk senjata di Pos Polisi Kutilik, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, 4 Januari 2014. Kedua, TPN menewaskan seorang tukang ojek bernama Muhammad Halil di Kampung Wuyuneri, di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, 7 Januari 2014. Ketiga, TPN menembaki pesawat milik perusahaan Susi Air, 7 Januari 2014. Berita tentang ketiga peristiwa ini, lihat “Di Puncak Jaya, Tukang Ojek Tewas Ditembak,” dalam SKH Cenderawasih Pos, Rabu, 8 Januari 2014.

diakui oleh Jenderal TNI Budiman semasa menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Budiman menegaskan bahwa Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) harus ditindak tegas, dan mengedepankan prosedur tetap (protap) yang berlaku, serta memegang teguh Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Ketiga, masih adanya pengibaran bendera Bintang Kejora yang adalah lambang dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sekalipun pemerintah Indonesia telah memperkenalkan bendera Merah Putih kepada orang Papua sejak tahun 1963, hingga kini belum semua orang Papua merangkul bendera tersebut. Sebagian orang Papua, sekalipun jumlah persisnya tidak diketahui, masih berpandangan bahwa bendera Merah Putih sebagai simbol dari penjajahan. Mengibarkan bendera Merah-Putih diartikan sebagai suatu tindakan yang mengungkapkannya penerimaan dan penaklukan di bawah penjajah. Maka, mereka tidak tergerak untuk mengibarkan bendera Merah-Putih di halaman rumahnya. Mereka memandang bendera Bintang Kejora sebagai bendera miliknya. Sekalipun mereka mengetahui bahwa pengibaran bendera Bintang Kejora dilarang oleh pemerintah Indonesia, mereka nekad mengibarkannya dan rela menanggung segala resiko yang diakibatkan oleh tindakan pengibaran bendera terlarang ini. Mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora secara suka rela, tanpa pemaksaan dari pihak-pihak eksternal. Mereka malah berbangga hati apabila mereka telah berhasil mengibarkannya, sekalipun di hutan belantara. Mereka bahkan rela ditangkap, diadili, dipenjarakan, dan bahkan dibunuh karena melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora. Aksi pengibaran bendera Bintang Kejora yang masih dilaksanakan hingga kini sudah menjadi salah satu simbol perlawanan.

Keempat, masih adanya tuntutan referendum. Satu hal yang menarik untuk disimak adalah bahwa tuntutan referendum ini disuarakan oleh orang Papua, terutama generasi muda Papua kelahiran 1980-an dan awal 1990-an. Satu kelompok orang muda yang cukup dikenal dalam merepresentasi tuntutan referendum ini adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB).<sup>5</sup> Mereka tidak mendapatkan pendidikan Belanda seperti kebanyakan pejabat

---

<sup>4</sup> Penegasan ini disampaikan oleh KSAD, Jenderal TNI Budiman dalam pengarahannya kepada para prajurit dan pegawai negeri sipil di Lapangan Apel Makodam XVII/Cenderawasih, Jumat, 22/11/2013. Berita lengkapnya, lihat Surat Kabar Harian (SKH) Cenderawasih Pos, 23 November 2013.

<sup>5</sup> Salah satu contoh demonstrasi KNPB yang menyuarakan tuntutan referendum bagi Papua Barat dilakukan 26 November 2014. Berita selengkapnya, lihat SKH Cenderawasih Pos, 27 November 2014.



dan politisi senior Papua. Mereka juga tidak mengalami tentang bagaimana Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 dilaksanakan. Mereka tidak mempunyai ikatan historis terhadap bagaimana OPM dibentuk dan awal mula perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Mereka dilahirkan di Tanah Papua pada zaman Indonesia sehingga mereka sesungguhnya lebih banyak mendapatkan pengaruh dari pemerintah Indonesia. Sekalipun demikian, mereka nekad menyuarkan tuntutan referendum secara terbuka melalui demonstrasi-demonstrasi yang dilaksanakan di pelbagai kota di Indonesia.

Kelima, masih adanya perayaan peringatan 1 Desember. Apa yang diperingati orang Papua pada setiap tanggal 1 Desember, sebenarnya adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Desember 1961, ketika bendera Bintang Kejora, pertama kali dan secara resmi, dikibarkan bersama dengan Bendera Belanda dalam suatu upacara resmi di kota Hollandia (kini disebut Jayapura), dengan harapan bahwa pada suatu saat bendera Belanda akan diturunkan dan hanya bendera Bintang Kejora yang tetap berkibar sebagai tanda akan keberadaan negara Papua Barat. Orang Papua, sekalipun belum tahu jumlahnya persisnya, memperingati peristiwa 1 Desember ini, walaupun peringatan ini dilihat sebagai suatu kegiatan separatis dan karena itu dilarang oleh pemerintah Indonesia melalui kepolisian (POLRI) dan militer (TNI). Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada orang Papua yang nekad merayakannya, sekalipun mereka tahu dan sadar bahwa setelah perayaan berlangsung, mereka akan dikejar, ditangkap, diadili, dan dipenjarakan belasan tahun.<sup>6</sup> Peringatan ini dilaksanakan baik melalui kegiatan demonstrasi maupun ibadah. Mereka merasa bangga melihat dirinya dengan berani dan sukarela dapat merayakan peringatan 1 Desember. Perayaan ini sudah menjadi salah satu simbol perlawanan orang Papua.

Keenam, adanya sikap saling mencurigai dan tidak percaya antara orang Papua dan pemerintah Indonesia. Pemerintah mencurigai setiap orang Papua sebagai separatis. Dalil yang berlaku bagi pemerintah adalah “setiap orang Papua adalah separatis, sampai dia terbukti bahwa bukan separatis”. Maka, begitu melihat orang Papua, kecurigaan sebagai separatis secara otomatis dikenakan kepadanya. Maka, pemerintah sendirilah yang menempatkan orang Papua bukan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)

---

<sup>6</sup> Peringatan 1 Desember 2013 diadakan di beberapa kota, seperti Jayapura, Timika, Merauke, Biak, Nabire, Manokwari. Berita selengkapnya, lihat SKH Cenderawasih Pos, 2 Desember 2013.



melainkan sebagai musuh negara Indonesia yang mesti dihabiskan dari bumi Indonesia. Sementara orang Papua, sekalipun tidak semuanya, memandang pemerintah Indonesia sebagai penjajah dan karena itu susah dipercayai.

Ketujuh, adanya operasi militer yang dilancarkan pemerintah Indonesia di Tanah Papua. Guna membersihkan separatis yang adalah musuh negara, pemerintah pernah mengedepankan pendekatan keamanan yang diwujudkan, antara lain, melalui sejumlah operasi militer yang dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 1963. Setiap operasi militer yang dilakukan oleh TNI diberikan namanya tersendiri. Sejumlah contoh disebutkan di sini, seperti Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), operasi militer di Kabupaten Jayawijaya (1977) yang lebih luas dikenal dengan nama 'Peristiwa 77', Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), dan Operasi Sapu Bersih (1985). Semua operasi militer ini dibiayai negara dan dilaksanakan dengan tujuan membersihkan kelompok separatis yang dipandang mengacaukan keamanan dan merongrong keutuhan NKRI.

Operasi militer ini telah menewaskan korban, baik di pihak warga sipil maupun di pihak TNI, namun jumlah korban dari setiap operasi militer tidak diketahui secara pasti karena belum dilakukan investigasi yang dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkompeten. Satu hal yang pasti adalah pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah menimbulkan dampak negatif terhadap situasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua.<sup>7</sup> Sampai saat ini baru diketahui jumlah korban dari satu operasi militer yang dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya tahun 1977. Operasi militer ini dikenal secara luas dengan nama 'Peristiwa 77'. *Asian Human Rights Commission (AHRC)* yang berkedudukan di Hongkong mengumumkan hasil investigasinya pada November 2013 bahwa operasi militer tersebut telah menewaskan sebanyak 4.146 orang Papua. Laporan tersebut memuat juga nama-nama korban yang telah diidentifikasi. Menurut keterangan sejumlah masyarakat setempat, data-data korban dari sejumlah kampung lain yang juga menjadi sasaran operasi militer dalam peristiwa 77 belum dikumpulkan,

---

<sup>7</sup> Mengenai pendekatan keamanan dan dampaknya terhadap situasi HAM di Tanah Papua selama Papua berada dalam Republik Indonesia, lihat Tim Imparsial, 2011.

sehingga diperkirakan bahwa jumlah korban dalam operasi ini melampaui jumlah korban yang telah diidentifikasi.<sup>8</sup>

### **Kodrat dari Konflik Papua**

Integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia sudah berumur 52 tahun. Maka, asumsinya adalah bahwa berkat pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selama setengah abad, seharusnya nasionalisme Indonesia sudah tertanam di hati orang Papua. Orang Papua semakin mencintai dan dengan gembira serta bangga mengibarkan bendera Merah Putih di bumi cenderawasih. Tuntutan Papua Merdeka seharusnya sudah terkubur. Bendera Bintang Kejora sudah tidak perlu dikibarkan lagi. Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah harus menjadi sebuah kenangan masa lalu. Generasi muda Papua kelahiran tahun 1980-an tidak lagi menuntut Referendum. Tuduhan separatis tidak terdengar lagi. Tidak ada lagi perayaan peringatan 1 Desember. Namun semua asumsi ini tidak terbukti karena kenyataan di lapangan, seperti yang digambarkan di atas, memperlihatkan bahwa konflik Papua masih ada dan belum dituntaskan secara komprehensif dan permanen.

Konflik Papua dapat diselesaikan secara permanen dan solusi yang tepat dapat ditemukan hanya apabila kodrat dari konflik ini dipahami secara benar. Konflik Papua tidak merupakan konflik horizontal antara warga sipil. Ini bukan konflik antarsuku-suku asli Papua. Bukan pula konflik antaranggota gereja yang berbeda atau pemeluk agama yang berbeda. Konflik Papua tidak terjadi antara orang asli Papua dan komunitas-komunitas non-Papua yang berasal dari berbagai suku di luar Papua, seperti dari Jawa, Sulawesi, Sumatera; dan lain-lain. Adalah suatu kekeliruan apabila, konflik Papua dipahami sebagai pertikaian internal antara orang Papua, terutama antara mereka yang mendukung pemerintah dan yang mendukung OPM. Suatu kesalahan besar apabila masalah Papua direduksi menjadi sekedar masalah ekonomi dan pembangunan.

Konflik Papua, dari kodratnya, adalah konflik vertikal yakni konflik antara pemerintah Indonesia yang berpusat di Jakarta dan orang Papua yang bergabung dalam OPM dengan berbasis di Tanah Papua. Oleh sebab itu, istilah yang tepat adalah konflik Jakarta vs Papua. Konflik ini terjadi antara

---

<sup>8</sup> Mengenai laporan tentang korban pelanggaran HAM dalam “peristiwa 77”, lihat Asian Human Rights Commission, *The Neglected Genocide: Human Rights Abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978*.

pemerintah Indonesia yang mempertahankan Papua sebagai bagian dari negara Indonesia dan OPM yang berjuang memisahkan Papua dari Indonesia guna membentuk negara Papua Barat. Maka, konflik ini, sejatinya, merupakan konflik politik yang sudah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Konflik vertikal ini telah menelan banyak korban jiwa. Korbannya mencakup warga sipil, anggota POLRI, dan anggota TNI. Lebih banyak korban akan terus berjatuh apabila konflik Jakarta-Papua ini tidak dicarikan solusinya.

### **Menangani Konflik Papua secara Konstruktif**

Konflik Jakarta vs Papua atau konflik Papua yang bercorak destruktif mesti dikelola menjadi konstruktif. Pengelolaan konflik ini membutuhkan suatu proses transformasi konflik.<sup>9</sup> Dengan mengedepankan proses transformasi konflik, dimensi destruktif dari konflik Papua hendak diidentifikasi dan diminimalisir dan pada saat yang sama dimensi konstruktif dimaksimalkan. Sebelum melanjutkan refleksi tentang bagaimana menangani konflik Papua melalui proses transformasi konflik, perlu dipaparkan secara jelas perbedaan konsep tentang transformasi konflik dan resolusi konflik. Dibandingkan dengan resolusi konflik, istilah transformasi konflik masih relatif baru dalam pemakaiannya. Akibatnya, terkadang pemakaian istilah transformasi konflik membingungkan banyak pihak. Orang seringkali menggunakan istilah transformasi konflik, tetapi apa yang dimaksudkan sebenarnya adalah resolusi konflik. Oleh sebab itu, perlu dipertegas dan diperjelas perbedaan konsep antara transformasi konflik (*conflict transformation*) dan resolusi konflik (*conflict resolution*). Masing-masing mempunyai pemahaman yang berbeda dan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi dan mengelola konflik.

Dalam resolusi konflik, perhatiannya difokuskan pada masalah-masalah yang sedang terjadi. Hal yang dicari melalui resolusi konflik adalah solusi-solusi dari masalah yang sedang dibahas. Sebab itu, resolusi konflik cenderung berkonsentrasi pada substansi atau isi masalah. Pertanyaan pokok pada resolusi konflik adalah: Bagaimana mengakhiri sesuatu yang tidak diinginkan? Guna mengakhiri suatu konflik, isi dari konflik mesti dipahami secara benar. Berdasarkan pemahaman yang benar tersebut, solusi yang tepat mesti ditetapkan. Maka, dua pertanyaan digumuli dalam resolusi

---

<sup>9</sup> Penjelasan terinci tentang perbedaan antara Resolusi konflik dan Transformasi konflik, lihat Lederach, 2003: 28-33.



konflik: Apa isi dari masalah yang sedang dibahas? Apa solusi yang tepat? Pengandaiannya adalah bahwa hanya apabila isi dari suatu masalah sudah diidentifikasi secara benar dan jelas, maka solusi yang tepat dapat ditetapkan. Sebaliknya, kalau isi dari suatu masalah dipahami secara keliru, maka solusi yang ditetapkan juga tidak akan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Sementara itu, dengan transformasi konflik, perhatiannya diberikan selain pada isi masalah seperti pada resolusi konflik, tetapi juga memusatkan perhatian pada konteks pola-pola relasi. Transformasi konflik melihat masalah sebagai suatu kesempatan untuk masuk dalam konteks yang lebih luas, untuk mengeksplorasi dan memahami sistem relasi dan pola-pola yang melahirkan krisis. Dari perspektif transformasi konflik, diakui bahwa suatu konflik mempunyai dampak terhadap aspek personal, relational, struktural, dan kultural. Maka, empat aspek ini tidak boleh diabaikan dalam penanganan suatu konflik. Menangani suatu konflik berarti memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada keempat aspek ini. Oleh sebab itu, transformasi konflik menangani bukan hanya masalah-masalah yang mendesak melainkan juga sistem pola-pola relasi. Maka, pertanyaan pokok bagi transformasi konflik adalah: bagaimana mengakhiri sesuatu yang tidak diinginkan dan membangun sesuatu yang diinginkan? Dengan demikian, suatu masalah dari perspektif transformasi konflik dicermati dalam perspektif jangka pendek dan panjang. Transformasi konflik menangani baik masalah-masalah yang mendesak maupun sistem pola-pola relasi. Transformasi konflik tidak akan berhenti pada upaya mengatasi suatu masalah tertentu yang disebutnya sebagai episode konflik tetapi mencari pusat getar konflik yang disebutnya sebagai episentrum. Episentrum adalah pusat getar yang menghasilkan energi-energi yang menghasilkan episode-episode konflik. Jadi transformasi konflik menangani baik episode maupun episentrum konflik. Dalam transformasi konflik, suatu episode konflik merupakan sebuah kesempatan untuk menemui episentrum yang menghasilkan getaran dari konflik.

Setelah memahami perbedaan pengertian tentang transformasi konflik dan resolusi konflik, maka kita merefleksikan tentang bagaimana menangani konflik Papua secara konstruktif dengan menerapkan pendekatan transformasi konflik. Hal pertama yang perlu diakui dalam transformasi suatu konflik adalah bahwa mesti ada pengakuan tentang adanya konflik. Orang mesti mengakui bahwa ada konflik yang sedang berlangsung dan belum diselesaikan. Maka, kita mesti mengakui bahwa ada konflik di Papua yakni konflik antara Jakarta vs Papua yang hingga kini





belum dituntaskan. Sejumlah indikator konflik sudah digambarkan di atas. Pertanyaan, sekarang, adalah bukannya apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik Papua, tetapi bagaimana kita mentransformasi konflik Papua ini? Dengan demikian, perhatiannya difokuskan bukan pada isi masalah dan solusinya, melainkan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan suatu solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan menekankan aspek metodologi, perhatiannya diarahkan pada pendekatan, mekanisme, cakupan bidang, alat atau sarana yang digunakan, dan pihak-pihak yang dilibatkan sebagai peserta dalam mentransformasi konflik Papua. Oleh sebab itu, dalam upaya transformasi konflik Papua, perhatiannya tidak dipusatkan hanya pada isi atau substansi masalah dan solusinya melainkan juga pada jaringan dan sistem pola-pola relasi. Pertanyaannya adalah: Bagaimana mengakhiri sesuatu yang tidak diinginkan dan membangun sesuatu yang diinginkan oleh semua pihak demi Papua yang damai? Bagaimana konflik Papua ditangani dengan cara mereduksi kekerasan dan menciptakan keadilan dalam hubungan antarmanusia? Bagaimana mengembangkan suatu kemampuan berinteraksi yang langsung, jujur, dan konstruktif antara penduduk di Tanah Papua serta antara Papua dan Jakarta dan pada saat yang sama menangani, secara sistemik dan struktural, konflik Papua?

Perubahan konflik Papua dari yang destruktif menjadi konstruktif, melalui proses transformasi konflik, dapat dilakukan apabila ada kemampuan untuk mencermati, memahami, dan memberikan respons pada masalah-masalah dalam konteks relasi dan proses perubahan. Transformasi konflik mengantar kita untuk memusatkan perhatian pada proses dan menggumuli bagaimana proses perubahan itu dapat dilaksanakan, atau bagaimana proses lain dapat ditimbulkan untuk menggerakkan konflik ke arah yang konstruktif. Perubahan konflik Papua dari destruktif ke konstruktif menuntut suatu kontemplasi baik tentang situasi yang ada maupun situasi yang baru. Transformasi konflik juga menuntut adanya suatu visi tentang Papua, suatu visi yang dapat memungkinkan semua orang bergerak maju ke arah yang sama dan melibatkan diri dalam proses perubahan di semua tingkatan relasi. Visi Papua perlu diciptakan dan disosialisasikan agar diperjuangkan oleh semua pihak.

Kedua, pendekatan transformatif melihat dan memahami episode konflik tertentu bukan sebagai suatu peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi sebagai yang melekat pada pola yang lebih besar. Transformasi konflik menuntut kita untuk melihat dan mencermati berbagai episode konflik Papua yang merupakan ekspresi konflik yang muncul dalam kurun waktu



tertentu dan episentrum yang menjadi pusat getaran yang menghasilkan energi pada konflik Papua. Transformasi konflik membantu kita untuk menjadikan episode-episode konflik Papua sebagai kesempatan untuk menemukan pusat getaran konflik Papua. Kita dapat mengatakan bahwa indikator-indikator konflik yang digambarkan di atas merupakan episode-episode konflik Papua. Semua episode ini berasal dari suatu pusat gerakan. Maka, pusat yang menggerakkan dan menghasilkan episode-episode konflik Papua mesti ditemukan dan diidentifikasi secara jelas dalam proses transformasi konflik Papua.

Ketiga, dalam perspektif transformasi konflik, dipahami bahwa suatu konflik membawa dampak perubahan pada empat kategori yakni kategori personal, relasional, struktural, dan kultural. Pada **aspek personal**, konflik Papua membawa perubahan yang berdampak mendalam pada keseluruhan pribadi. Konflik Papua mengubah dimensi kognitif, emosional, persepsional, dan spiritual pada diri seseorang. Individu yang terlibat dalam atau kena dampak dari konflik tentunya dipengaruhi oleh konflik dalam cara yang negatif atau positif. Orang Papua yang pernah mengalami penganiayaan, penembakan, intimidasi, luka tembak, atau bahkan pemenjaraan karena konflik Papua tentunya mengalami perubahan pada dimensi personalnya. Konflik Papua membentuk pandangan orang Papua tentang siapa dirinya dan bagaimana orang Papua mengidentifikasi dirinya serta mempengaruhi cara mengidentifikasi orang non-Papua. Konflik ini juga mempengaruhi dan menentukan kehadiran dari siapa yang memberikan rasa aman dan tenteram bagi orang Papua dan kehadiran siapa yang mengakibatkan perasaan gelisah atau bahkan cemas bagi orang Papua. Konflik Papua mengubah perspektif orang Papua tentang dirinya dan tanahnya. Perubahan pada aspek personal ini terjadi juga pada orang non-Papua yang hidup di Papua. Konflik Papua mempengaruhi dimensi kognitif, emosional, persepsional dan spiritual mereka. Konflik Papua mempengaruhi bagaimana mereka mengidentifikasi dirinya dan memandang orang Papua yang hadir di sekitarnya. Konflik ini menentukan siapa yang dapat memberikan rasa aman dan siapa yang mengakibatkan perasaan cemas dan gelisah. Konflik Papua juga turut mempengaruhi dan mengubah dimensi fisik, emosional, intelektual, dan spiritual baik dari orang Papua maupun orang non-Papua. Oleh sebab itu, konflik Papua perlu ditransformasi agar dimensi destruktif yang terjadi pada pribadi seseorang diminimalisir dan dimaksimalkan potensi pertumbuhan pribadi pada bidang fisik, emosional, intelektual, dan spiritual.



Pada **aspek relational**, konflik Papua mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi baik antarpribadi maupun antarkelompok. Konflik ini mengubah relasi tatap muka (*face to face relation*). Konflik Papua mempengaruhi pemahamannya tentang keberadaan dirinya, keberadaan orang lain, harapan dirinya dan harapan orang lain, ketakutan yang ada pada dirinya dan ketakutan orang lain. Konflik Papua membagi masyarakat Papua dalam dua kelompok berdasarkan ras yakni ras Melanesia dan Melayu. Konflik ini mempengaruhi kualitas dan intensitas komunikasi dan interaksi antara orang Melanesia dan Melayu. Pengalaman hidup masyarakat di Tanah Papua memperlihatkan bahwa komunikasi yang intensif, jujur, dan mendalam terjadi antara orang-orang yang mempunyai ras yang sama. Tetapi komunikasinya kurang intensif, jujur, dan mendalam, antara orang yang mempunyai ras Melanesia dengan Melayu. Kesamaan agama tidak menjadi dasar pemersatu dan sarana yang memudahkan komunikasi. Kesamaan ras tampak lebih berpengaruh dan menentukan intensitas, kedalaman, dan efektifitas komunikasi dan interaksi antarindividu di Tanah Papua. Keterpecahan masyarakat berdasarkan ras ini mengakibatkan munculnya kecurigaan dan ketidakpercayaan antara orang Melanesia dan Melayu. Kecurigaan dan ketidakpercayaan ini, pada gilirannya, mengakibatkan rendahnya mutu komunikasi antara orang Melanesia dengan Melayu. Mereka belum bisa membagi ketakutan, kecemasan, dan harapan, antara orang-orang yang berbeda ras. Maka, dalam menangani konflik Papua, perbaikan komunikasi dan interaksi antara orang Melanesia dan Melayu tidak boleh diabaikan. Transformasi konflik diperlukan untuk memaksimalkan pengertian yang saling mendukung antara pribadi dan kelompok dengan membagikan secara eksplisit ketakutan, harapan, dan tujuan ke permukaan.

Pada **aspek struktural**, konflik Papua menyentuh akar masalah atau penyebab utama dari konflik dan perubahan yang diakibatkannya dalam struktur politik dan ekonomi. Konflik Papua telah membawa dampak pada struktur pemerintahan, organisasi politik seperti partai politik di Tanah Papua. Konflik Papua mempengaruhi bukan hanya isi tetapi juga metodologi yang diterapkan dalam menggodok kebijakan pemerintah. Konflik Papua menentukan siapa yang mesti dilibatkan dan atau diabaikan dalam membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat dan membawa dampak yang besar bagi masyarakat di Tanah Papua. Misalnya, kebijakan pemindahan penduduk yang dikemas dalam program transmigrasi telah mengubah wajah demografi di Tanah Papua. Atau, kebijakan pemerintah tentang pertambangan ekstraktif mengubah kepemilikan tanah ulayat, tempat perburuan, dan



fungsi sakralitas dari gunung tempat tambang digali. Maka, dalam menangani konflik Papua, perhatiannya difokuskan pada bagaimana berbagai struktur sosial, organisasi, dan institusi dibangun, dipertahankan, dan diubah oleh konflik. Transformasi konflik dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari konflik, meminimalisir dan pada akhirnya menghilangkan kekerasan, memaksimalkan cara-cara tanpa kekerasan, mempromosikan struktur perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, seraya memaksimalkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan.

**Aspek kultural**, konflik Papua berdampak pada aspek kebudayaan. Konflik ini membawa perubahan pada pola kehidupan kelompok meliputi identitas serta cara budaya memengaruhi pola respon dan konflik. Konflik Papua menciptakan kelompok “kami” dan kelompok “mereka”. Konflik Papua mengubah cara orang Melanesia memelihara dan membela ketahanan komunitas kultural. Konflik Papua mengubah cara orang Melanesia mengatasi konflik di mana tidak semua metode tradisional dilanjutkan dan diterapkan karena situasi zamannya sudah berubah. Orang Melanesia ditantang dan dituntut untuk menciptakan metodologi baru dan tepat-guna dalam menghadapi konflik. Maka, transformasi konflik membantu kita memahami pola kultural yang memiliki kontribusi pada terjadinya konflik, kemudian mengidentifikasi, mempromosikan, dan membangun sumber daya dan mekanisme dalam kultur setempat untuk merespon dan menangani konflik secara konstruktif.

### **Kedudukan dan Peranan Dialog**

Dari perspektif transformasi konflik, dialog tidak dilihat sebagai solusi dari suatu konflik. Dialog bukanlah salah satu solusi di antara sekian solusi yang ditawarkan atau tersedia. Dialog dipandang sebagai sarana atau alat yang dapat digunakan untuk mendalami konflik secara intensif dan menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dialog diakui sebagai sesuatu yang esensial, tetapi tetap merupakan salah satu, bukan satu-satunya, sarana dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian.

Proses perubahan konflik Papua dari destruktif menjadi konstruktif tidak dapat dilakukan melalui jalan kekerasan. Pengalaman selama 52 tahun memperlihatkan bahwa penembakan, pembunuhan, penganiayaan, intimidasi, teror, operasi militer, dan bentuk-bentuk kekerasan yang lain tidak pernah berhasil mengubah situasi yang destruktif menjadi konstruktif



di Tanah Papua. Hal ini dapat dimaklumi karena sesuatu yang konstruktif tidak dapat dibangun dengan mengandalkan dan menggunakan pendekatan dan sarana yang destruktif. Maka, perubahan ke arah yang konstruktif menuntut cara-cara dan mekanisme yang konstruktif. Tanpa mengabaikan sarana-sarana perubahan konstruktif yang lain, dialog mempunyai kedudukan yang penting dalam proses transformasi konflik Papua. Dalam dialog pihak pemerintah dan orang Papua tidak saling menuding, menuduh, dan mempersalahkan satu sama lain. Dialog bukan tempat saling mengadili, melainkan wadah semua pihak yang terlibat dalam konflik Papua bisa bertemu dan atau dipertemukan. Tujuannya untuk mengatur proses transformasi konflik dari yang destruktif menjadi konstruktif. Caranya adalah bersama membangun mekanisme penyelesaian konflik yang berprinsip anti-kekerasan (*non-violence*), berkesinambungan, partisipatif, dan bersikap responsif dalam jangka waktu pendek tetapi juga strategis dalam jangka panjang. Dalam dialog, partner dialog tidak dipandang sebagai musuh yang perlu dibasmi dari muka bumi, melainkan sebagai sesama manusia yang mempunyai martabat kemanusiaan. Kemanusiaan dari partner dialog, bukan hanya diakui dan dihormati, tetapi dijadikan fondasi dari dialog. Partner dialog dipandang sebagai sesama manusia yang dapat memberikan sumbangan yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik Papua.

Dalam dialog, kita tidak hanya berhenti pada menangani episode-episode yang mewarnai konflik Papua yang indikator-indikator yang digambarkan di atas. Episode-episode konflik tersebut dapat diselesaikan melalui larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi episode-episode konflik ini akan muncul kembali selama episentrumnya belum ditangani. Maka, melalui dialog, para pemangku kepentingan dapat melihat, mencermati, menyentuh akar-akar penyebab dari konflik Papua dengan menggunakan episode-episode yang digambarkan di atas sebagai jendela atau lensanya.

Melalui dialog, semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam menganalisa tentang perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh konflik pada beberapa level yakni personal, relasional, struktural, dan budaya. Melalui dialog, para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh konflik Papua, masalah-masalah yang perlu dicarikan solusinya dengan cepat di berbagai level (personal, relasional, spiritual, dan budaya), serta merancang perubahan-perubahan yang dikehendaki, dan bersama-sama menetapkan mekanisme untuk mendapatkan solusi-solusi yang responsif tetapi juga strategis. Dialog

Jakarta-Papua membuka ruang dan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk menggali masalah-masalah yang mendasari konflik Papua, menganalisa perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh konflik Papua, merancang visi bersama tentang masa depan Papua yang dikehendaki oleh semua pihak, serta menetapkan perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh semua pihak.

Pentingnya dialog antara pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta dan orang Papua yang bergabung dalam OPM guna menyelesaikan konflik Papua sudah diakui dan didukung oleh banyak pihak di Tanah Papua. Para pimpinan agama di Tanah Papua, baik secara pribadi maupun kolektif, telah menyatakan dukungannya terhadap dialog sebagai sarana penyelesaian konflik Papua. Para pimpinan agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha di Tanah Papua, secara bersama, berulang kali menekankan pentingnya dialog demi menciptakan Papua Tanah Damai. Pada tahun 2007, para pimpinan agama dari seluruh Tanah Papua mendorong pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) agar “segera menyelesaikan perbedaan ideologi di Papua dengan sebuah dialog yang jujur dan terbuka antara pemerintah pusat dan orang asli Papua dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan disetujui oleh kedua belah pihak.”<sup>10</sup> Mengakui adanya pro dan kontra terhadap pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA),<sup>11</sup> para pimpinan Gereja mengusulkan agar masalah ini diselesaikan melalui suatu dialog damai. Mereka mengatakan,

“Kami mendorong Pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah PEPERA ini melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Betapa pun sensitifnya, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog damai antara Pemerintah dan orang Papua.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pokok-pokok Pikiran Pimpinan Agama dalam Upaya Membangun Dialog Menuju Papua Tanah Damai, yang ditetapkan bersama oleh para pimpinan agama dari Provinsi Papua, dalam loka karya Papua Tanah Damai, tgl 3-7 Desember 2007, di Sentani, Jayapura, no.A.10.

<sup>11</sup> Mengenai pro dan kontra terhadap Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, lihat Drooglever, 2009; lihat juga Saltford, 2003.

<sup>12</sup> Pernyataan Keprihatinan Para Pimpinan Gereja yang dikeluarkan di Jayapura, 22 Oktober 2009.

Tidak hanya dalam kelompok, tetapi secara pribadi pun, pimpinan Gereja menyatakan dukungan terhadap dialog Jakarta-Papua. Pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Jayapura, Uskup Leo Laba Ladjar, mendahului semua pimpinan agama dan gereja lain, sudah menyatakan dukungannya terhadap inisiatif rakyat Papua yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Papua melalui dialog dan perundingan. Ia mengatakan,

“Rakyat Papua sudah bertekad untuk berjuang tanpa kekerasan, tetapi melalui perundingan dan diplomasi, dengan cara damai dan demokratis. Sikap yang amat simpatik itu harap tidak dijawab oleh Bedil, Bom dan Penjara.” (Ladjar, 2009: 13)

Pendapat uskup Leo dipertegas oleh Pendeta Socrates Sofyan Yoman, ketua Pengurus Badan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, “Persoalan Papua hanya dapat diselesaikan lewat dialog damai, yang jujur dan setara antara Indonesia dan Papua. Dialog itu tanpa syarat dan dimediasi oleh pihak ketiga di tempat netral.”<sup>13</sup>

Dukungan terhadap dialog damai demi penyelesaian konflik diberikan oleh berbagai pihak di luar Tanah Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 9 November 2011, mengumumkan komitmen pemerintah tentang pentingnya dialog terbuka dengan rakyat Papua. Presiden menegaskan, “Dialog antara pemerintah pusat dan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk cari solusi dan opsi, mencari langkah paling baik selesaikan masalah Papua.”<sup>14</sup> Pernyataan Presiden Yudhoyono ini membuka babak baru terhadap wacana dialog antara pemerintah dan rakyat Papua. Berbagai tokoh masyarakat, budayawan, akademisi, dan tokoh perempuan dari seluruh provinsi di Indonesia turut memberikan dukungan terhadap dialog Jakarta-Papua. (Lih. Sarapung, 2013). Dukungan terhadap dialog Jakarta-Papua sudah diberikan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Gereja Katolik melalui Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), mendorong pemerintahan pusat untuk mewujudkan dialog dengan masyarakat Papua. KWI menekankan keterlibatan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, entah OPM atau apa pun namanya, dan merekomendasikan keterlibatan pihak ketiga yang terpercaya untuk menjadi penengah dalam

---

<sup>13</sup> “Otsus Gagal, Dialog Jakarta-Papua Harga Mati,” dalam SKH Suluh Papua, 19 Oktober 2013.

<sup>14</sup> “Presiden: Pemerintah Buka Dialog dengan Papua,” dalam Republica.co.id, 9 November 2011, 17.44 WIB.

dialog tersebut.<sup>15</sup> Gereja-gereja Protestan yang bernaung di bawah Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), menuntut digelarnya Dialog Jakarta-Papua.<sup>16</sup> Muhammadiyah, melalui ketua pengurus pusatnya, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin memberikan dukungan akan diselenggarakan dialog Jakarta-Papua sebagai sarana penyelesaian konflik di Tanah Papua.<sup>17</sup>

Dukungan terhadap dialog berasal juga dari Organisasi non-Pemerintah (ORNOP) yang berkedudukan di Jakarta,<sup>18</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),<sup>19</sup> Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI),<sup>20</sup> akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia,<sup>21</sup> dan sejumlah tokoh agama dari berbagai kota dan provinsi di

---

<sup>15</sup> Lihat seruan KWI tentang Papua, 18 November 2011. “Hentikan Kekerasan! Marilah Berdialog,” dalam Seruan KWI tentang Papua. Jakarta.

<sup>16</sup> Lihat *Gresnew.com*, senin, 28 November 2011, 12:28 WIB.

<sup>17</sup> Lihat majalah *Selangkah*, 16 Desember 2013, 11:47.

<sup>18</sup> Salah satu organisasi non-pemerintah di Jakarta yang mendukung Dialog Jakarta-Papua adalah *Impartial*. Dukungannya telah dinyatakan, antara lain, melalui penyelenggaraan diskusi dan peluncuran buku “Dialog Jakarta-Papua: sebuah perspektif Papua” karya Neles Tebay tahun 2009 di Jakarta, memfasilitasi *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Dialog Jakarta-Papua bagi anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) di Bandung tahun 2011, dan menyelenggarakan konferensi pers tentang Dialog Jakarta-Papua.

<sup>19</sup> Mengenai dukungan DPR RI terhadap dialog, Lihat “DPR Rekomendasikan Dialog Papua dengan Pemerintah Pusat,” dalam *Antarnews.com*, 14 Januari 2010, 19.27, dan “Dialog Jakarta-Papua sudah sangat mendesak,” dalam *Investor Daily*, 10 Juni 2012.

<sup>20</sup> Mengenai tuntutan DPD RI yang meminta agar dilakukannya dialog terbuka antara pemerintahan SBY dengan tokoh yang mewakili masyarakat Papua, lihat “DPD Kesal SBY Tak Kunjung Gelar Dialog Jakarta-Papua,” dalam *RMol.co*, 22 Februari 2013, 16:09 WIB, dan “DPD beri perhatian pada Papua,” dalam *Sindonews.com*, 24 Februari 2013, 16:54.

<sup>21</sup> Para Akademisi Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) mendukung gagasan penyelesaian konflik secara damai. Setelah merefleksikan makna dialog Jakarta-Papua dari persektif teori resolusi konflik dan praktek penyelesaian kasus secara damai dari beberapa negara, mereka berkesimpulan bahwa konflik Papua mesti diselesaikan melalui negosiasi yang dimediasi oleh pihak yang netral dan independen. Mereka menggarisbawahi pentingnya dialog, untuk mempersiapkan penyelesaian konflik Papua melalui negosiasi. Mengenai pandangan para akademisi tentang penyelesaian konflik Papua melalui negosiasi, lihat Forum Akademisi untuk Papua Damai, 2012.



Indonesia.<sup>22</sup> Dukungan terhadap dialog Jakarta-Papua masih terus bertambah baik di Bumi Cenderawasih maupun di luar Tanah Papua.

### Partisipasi Pemangku Kepentingan

Proses perubahan konflik Papua dari yang destruktif menjadi konstruktif menuntut partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan. Mengamati sejarah konflik Papua selama lebih dari 50 tahun Papua berintegrasi ke dalam Republik Indonesia, ada sembilan kelompok pemangku kepentingan yang perlu terlibat dan dilibatkan dalam upaya mengtransformasi konflik Papua menuju terciptanya Papua Tanah Damai.<sup>23</sup>

Pertama, kelompok orang asli Papua, terutama mereka yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebanyakan dari mereka hidup di kampung-kampung. Mereka merasakan dampak secara langsung dari semua jenis konflik yang terjadi di negeri leluhurnya. Mereka inilah yang biasa dicurigai sebagai separatis dan karena itu diperlakukan sebagai musuh negara oleh pemerintah terutama oleh aparat keamanan. Mereka hidup dengan kenangan pahit dan luka di batinnya. Konflik Papua telah menyebabkan mereka hidup dengan memori yang terluka (*wounded memory*), sehingga setiap orang Papua mempunyai memori yang terluka ini. Memori ini membentuk pandangan mereka tentang dirinya, pemerintah, orang non-Papua, dan berbagai peristiwa sosial dan politik yang terjadi di Tanah Papua baik dalam skala kecil maupun skala besar. Mereka biasanya tidak diajak dan dilibatkan dalam proses membuat kebijakan yang akan mempunyai dampak langsung terhadap hidup dan masa depannya. Mereka tidak dihargai sebagai manusia, karena itu tidak diikutsertakan dalam membahas isi kebijakan tentang Papua. Mereka malah diabaikan dari proses pembuatan kebijakan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan atau solusi tertentu, sekalipun kebijakan tersebut dirumuskan dengan jelas dan ditetapkan pemerintah. Penolakan ini dilakukan, pertama-tama, bukan karena mereka tidak menyetujui isi dari kebijakan yang bersangkutan melainkan karena mereka tidak dilibatkan

---

<sup>22</sup> Salah satu contoh dukungan dari para tokoh agama, lihat “Petisi Masyarakat Sipil, Jaringan Antar-Iman se-Indonesia untuk Perwujudan Papua Tanah Damai,” yang ditandatangani di Yogyakarta, 15 Oktober 2013, oleh 459 tokoh agama yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Lih Sarapung, 2013: 423-438.

<sup>23</sup>Mengenai sembilan kelompok aktor ini, lihat Tebay. 2011. “Bersama Membangun Perdamaian Papua,” dalam SKH Suara Pembaruan, 2 Desember.



dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka tidak memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah tanpa partisipasi mereka dalam proses pembuatannya. Akibatnya, konflik Papua tidak pernah diselesaikan hingga tuntas. Karena itu mereka mesti dilibatkan dalam proses transformasi konflik Papua.

Kedua, kelompok penduduk Papua. Kelompok ini mencakup berbagai kelompok paguyuban yang berasal dari Sabang sampai Merauke, misalnya paguyuban Yogyakarta, Toraja, Batak, Sulawesi Selatan, Flobamora (Flores, Sumba, Timor, Alor), Gorontalo, Maluku, dan lain-lain. Mereka seringkali disebut sebagai pendatang dan atau non-Papua. Jumlah mereka terus bertambah setiap hari. Mereka datang ke Tanah Papua dengan menggunakan pesawat terbang, tetapi terutama dengan kapal penumpang yang menawarkan tiket yang lebih murah dibandingkan pesawat. Mereka hidup di Tanah Papua dan terutama menetap di semua ibukota kabupaten/kota dalam Provinsi Papua dan Papua Barat. Masyarakat non-Papua, bahkan, merupakan kelompok mayoritas penduduk di sejumlah kota seperti Jayapura, Merauke, Timika, Nabire, Manokwari, dan Sorong. Mereka berbeda bukan hanya dari sudut asal etnis dan agama tetapi juga dalam lamanya hidup di Tanah Papua. Dari antara mereka, ada yang lahir dan besar di Tanah Papua dan ada yang baru datang beberapa tahun yang lalu. Ada orang non-Papua yang termasuk generasi ketiga dan atau kedua yang lahir dan besar di Tanah Papua, ada yang baru generasi pertama di Tanah Papua. Karena sudah menjadi penduduk Papua, mereka pun merasakan berbagai peristiwa sosial dan politik yang terjadi di Tanah Papua. Kebijakan apa pun yang ditetapkan pemerintah untuk Tanah Papua mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap hidup dan masa depan mereka di Bumi Cenderawasih. Oleh sebab itu, keberadaan mereka di Tanah Papua mesti diakui. Pengakuan tersebut mesti diwujudkan dengan melibatkan mereka dalam proses transformasi konflik Papua. Berbagai kelompok paguyuban ini dapat dilibatkan dengan mengundang pimpinan atau wakil dari paguyuban, tokoh-tokoh dari semua agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, dan Budha), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para ahli yang mengajar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Tanah Papua.


Ketiga, kelompok pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta pemerintah daerah kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut. Kedua gubernur dan hampir semua bupati dan walikota yang adalah orang asli Papua. Sebagai pemimpin daerah, mereka ini dapat berperan sebagai pemacu pembangunan atau pemicu konflik. Kebijakan apa



pun yang mereka tetapkan, pasti mempunyai dampaknya, entah positif atau negatif, terhadap semua penduduk dalam kabupaten dan atau provinsinya. Mereka mengetahui masalah-masalah pembangunan yang perlu diatasi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi di wilayahnya masing-masing. Mereka juga mempunyai pengalaman sukses dan gagal dalam melaksanakan pembangunan. Semua pengalaman ini merupakan kekayaan yang dapat dibagikan dan digunakan dalam mencari penyelesaian komprehensif atas konflik Papua. Maka, kelompok pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu dilibatkan dalam proses transformasi konflik Papua. Mereka juga tidak boleh menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemangku kepentingan yang menentukan isi dari kebijakan tentang Papua. Mereka perlu mengakui adanya pemangku-pemangku kepentingan yang lain dalam masyarakat Papua.

Keempat, kelompok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Tidak seperti dalam era Orde Baru (Orba) di mana Tentara Nasional Indonesia (TNI) menangani gejolak politik di Tanah Papua. Dalam era reformasi ini POLRI merupakan aparat penegak hukum Indonesia yang sudah ditugaskan untuk selalu berada di barisan terdepan dalam menyelesaikan aksi-aksi politik di Tanah Papua. POLRI tentunya sudah mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber, termasuk semua orang yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka. Informasi-informasi ini sangat berguna dalam memperjelas bukan hanya masalah-masalah yang perlu diselesaikan dan membantu pencarian solusi-solusinya tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini.

Kelima, kelompok TNI. Sejarah Papua tidak bisa dipisahkan dari kelompok pemangku kepentingan ini. TNI berperan besar dalam merebut Papua dan mempertahakannya dengan berbagai cara, termasuk kekerasan, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peranan TNI sangat dominan, terutama ketika Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) di mana TNI memutuskan isi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan bagi Papua. Setelah status DOM dicabut dari Papua, daerah ini diberikan status Otonomi Khusus (OTSUS). Justru sejak diberlakukannya kebijakan Otsus tahun 2001, pemerintah meningkatkan secara signifikan jumlah anggota TNI yang dikirim ke Papua. Mereka ditugaskan di berbagai tempat di Tanah Papua. Peningkatan jumlah anggota TNI secara signifikan di Tanah Papua diperlihatkan melalui penggemukan anggota baru dengan mendirikan satu kompi baru pada tiga Batalyon Infantri (YONIF) masing-masing di Jayapura, Nabire, dan Sorong. Setelah itu pemerintah mendirikan tiga YONIF baru di Merauke, Timika, dan Wamena. Ditambah lagi, pemerintah



menambah KOREM baru, dan mendirikan sejumlah KODIM baru di sejumlah kabupaten yang baru didirikan. Kehadiran dan pengaruh TNI masih cukup kuat terasa hingga kini. Maka, TNI perlu dilibatkan dalam proses transformasi konflik Papua.

Keenam, kelompok pemerintah pusat. Terkadang ada pihak yang berpendapat bahwa konflik Papua merupakan persoalannya pemerintah daerah dan karena itu pemerintah pusat tidak mempunyai pengaruh terhadap konflik ini. Pandangan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena hampir semua kebijakan untuk Papua ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tentang pembentukan provinsi baru di Tanah Papua, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), eksploitasi pertambangan, transmigrasi, dan lain-lain semuanya dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penduduk Papua adalah pihak yang merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut. Pengalaman selama lebih dari 50 tahun Papua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan apa pun tentang Papua yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat menimbulkan konflik atau juga dapat membantu Papua menjadi aman. Oleh sebab itu, pemerintah pusat tidak boleh diabaikan atau menarik diri dan menonton proses penyelesaian konflik Papua. Pemerintah pusat mesti terlibat dan dilibatkan dalam menyelesaikan konflik Papua secara konstruktif melalui proses transformasi konflik bersama-sama dengan pemangku-pemangku kepentingan yang lain. Papua tidak akan menjadi tanah damai tanpa keterlibatan dan dukungan pemerintah pusat.

Ketujuh, kelompok perusahaan asing dan domestik yang mengeksploitasi kekayaan alam Papua. Kita ketahui bahwa ada perusahaan multinasional yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Tanah Papua, seperti PT. Freeport Indonesia yang mengeksploitasi tambang tembaga dan emas di kabupaten Mimika, *British Petroleum Tangguh Project* yang mengeksploitasi *Liquified Natural Gas* (LNG) di Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu ada perusahaan-perusahaan domestik yang mengeksploitasi hutan dan perusahaan-perusahaan domestik yang menanam Kelapa Sawit yang mengancam dan menghancurkan hutan dan ekosistem Papua. Di sejumlah tempat, perusahaan ini berperan sebagai penerobos isolasi geografis. Di tempat lain, kehadiran dan aktifitas eksploitasi dari perusahaan ini menimbulkan konflik, terutama dengan penduduk lokal. Konflik yang berkepanjangan akan merugikan perusahaan. Perusahaan-perusahaan justru diharapkan untuk mendukung upaya transformasi konflik Papua.

Kedelapan, kelompok Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) yang bergerilya di hutan Papua. Mereka



menyebar di sejumlah wilayah di Tanah Papua dan hingga kini masih aktif. Pada 1980-an, pemerintah Indonesia menyebut kelompok TPN ini sebagai Gerakan Pengacau Liar (GPL) dan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Mereka kini sering disebut sebagai Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Mereka menjadi korban pengejaran aparat keamanan, tetapi dalam sejumlah kasus, menjadi pelaku kekerasan. Sekalipun pemerintah melalui aparat militer telah berupaya membasmi mereka melalui pendekatan keamanan yang menggunakan dan menggandakan kekuatan senjata, mereka masih bergerilya hingga kini. Sekalipun Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua diterapkan, mereka belum tergerak dan terbuai dengan kebijakan ini. Selama mereka masih aktif melakukan kegiatannya, perdamaian tidak akan tercipta di Tanah Papua. Karena itu, mereka perlu dilibatkan dalam proses transformasi konflik Papua.

Kesembilan, orang-orang Papua yang hidup di luar negeri. Mereka hidup di negara Papua New Guinea (PNG), Belanda, Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan Vanuatu. Mereka meninggalkan negeri leluhurnya Tanah Papua dan hidup di negara-negara yang disebutkan ini bukan karena ingin merantau atau karena mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Keberadaan mereka di luar negeri merupakan salah satu akibat langsung dari konflik Papua yang belum dicarikan solusi yang demokratis. Sebab itu mereka melakukan aktifitas politik dan melakukan kampanye tentang konflik Papua dalam rangka mendapatkan simpati dan dukungan dari berbagai pihak di luar negeri. Sekalipun sejumlah tokoh orang Papua telah meninggalkan Papua di atas 20 tahun, sejumlah dari mereka masih mempunyai pengaruh yang kuat terhadap orang asli Papua di Tanah Papua. Perkembangan alat komunikasi, seperti *handphone* dan *internet*, memudahkan mereka melakukan komunikasi dengan pendukungnya di Tanah Papua. Pengaruh mereka terhadap masyarakat Papua mesti diakui dan karena itu mereka perlu diberikan akses dalam transformasi konflik Papua.

Menurut saya, setiap kelompok pemangku kepentingan yang disebutkan di atas berpotensi memicu konflik atau menciptakan perdamaian di Tanah Papua. Maka, pemerintah pusat perlu memberi ruang bagi setiap kelompok agar mereka dapat melakukan pertemuan internal dalam kelompoknya dan menghasilkan pandangan kolektif tentang masalah-masalah yang perlu diselesaikan, perubahan-perubahan yang diinginkannya, serta solusi-solusi responsif dan solusi-solusi strategis untuk jangka panjang.

## Lima Tahap Dialog

Sembilan kelompok pemangku kepentingan yang disebutkan di atas tidak dapat memberikan kontribusinya yang konstruktif apabila dibangun mekanisme eksklusif dalam proses pembuatan kebijakan atau pencarian solusi. Penggunaan mekanisme eksklusif telah terbukti pada masa Orba di mana kebijakan untuk Papua dikerjakan hanya oleh sebuah tim, yang terdiri dari sejumlah pakar di Jakarta, dan dibentuk oleh pemerintah pusat. Isi kebijakannya mungkin bagus dan akomodatif, tapi pengalaman memperlihatkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak berhasil menyelesaikan konflik Papua. Oleh sebab itu, mekanisme yang inklusif mesti diterapkan dalam proses transformasi konflik Papua. Suatu mekanisme inklusif dapat memungkinkan semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi secara aktif dalam membahas dan membangun solusi responsif dan strategis. Setiap kelompok pemangku kepentingan mendapatkan ruang untuk membahas dan memformulasikan pendapat kolektifnya yang akan disumbangkan pada proses transformasi konflik Papua. Maka, dengan mengutamakan mekanisme inklusif, perlu dibangun suatu tahapan yang memungkinkan sembilan kelompok pemangku kepentingan yang disebutkan di atas dapat berpartisipasi secara aktif.

Kami menawarkan lima tahapan pada proses transformasi konflik Papua.<sup>24</sup> Pertama, proses transformasi konflik Papua dimulai dengan diadakannya konsultasi publik bagi orang asli Papua di semua kabupaten dalam Provinsi Papua dan Papua Barat. Para tokoh adat, agama/Gereja, wanita, pemuda Papua diundang untuk memberikan pendapatnya tentang masalah-masalah yang melatarbelakangi konflik Papua dan solusi-solusinya. Selain itu, diperlukan pula konsultasi publik terpisah bagi penduduk Papua yang dihadiri oleh payububan-paguyuban orang non-Papua yang diwakili oleh pimpinan paguyuban, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, di setiap kabupaten. Kemudian, konsultasi publik khusus dan terpisah perlu diadakan bagi POLRI, TNI, pemerintah daerah, dan perusahaan - perusahaan asing dan domestik- yang mengeksplotasi kekayaan alam di Tanah Papua. Setiap kelompok pemangku kepentingan ini perlu difasilitasi dan diberi ruang agar berdiskusi dan merumuskan pendapat kolektif mereka tentang masalah-masalah yang perlu diselesaikan dan solusi-solusinya.

---

<sup>24</sup> Mengenai lima tahap persiapan dialog Jakarta-Papua, lihat Tebay, 2011, "Mempersiapkan Dialog Papua," dalam SKH Kompas, 8 Desember.

Kedua, setelah mendapatkan dan mengakomodir pendapat dari semua pemangku kepentingan di setiap kabupaten, maka tahapan berikutnya adalah penyelenggaraan dua konferensi regional yang membahas tentang perdamaian di Tanah Papua. Konferensi regional yang pertama diadakan bagi wakil-wakil orang asli Papua dari semua kabupaten di dua provinsi. Dalam konferensi ini, semua pendapat yang telah diakomodir pada tahapan pertama dipresentasikan, diperdalam, diperjelas, dan dipertegas sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama dari orang asli Papua tentang perdamaian, masalah dan solusinya. Setelah itu diadakan konferensi regional kedua yang dihadiri oleh wakil-wakil dari orang asli Papua dan non-Papua yang berasal dari semua kabupaten. Konferensi yang kedua ini menghasilkan kesepakatan bersama dari orang Papua dan non-Papua tentang perdamaian Papua, termasuk tentang masalah-masalah yang mesti diselesaikan dan solusi-solusinya. Melalui konferensi yang kedua ini, penduduk Papua dapat mempertegas dan memperlihatkan konsep perdamaian yang mereka perjuangkan, masalah-masalah yang perlu diatasi dan solusi-solusi yang perlu dilakukan demi terciptanya perdamaian di Tanah Papua.

Ketiga, sebagai lanjutan dari kedua konferensi regional ini, perlu diselenggarakan sebuah konferensi nasional tentang perdamaian Papua. Konferensi ini diadakan di Jakarta dan dihadiri oleh semua pemangku kepentingan. Dalam konferensi ini, dapat dipresentasikan hasil kesepakatan pada kedua konferensi regional, hasil konsultasi publik bagi POLRI, TNI, pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaan multinasional dan domestik yang mengeksploitasi SDA di Tanah Papua. Melalui konferensi nasional ini, perdamaian di Tanah Papua menjadi keprihatian nasional yang menuntut keterlibatan dan usaha bersama dari semua pemangku kepentingan di Indonesia.

Keempat, untuk melibatkan dua pemangku kepentingan lainnya yakni kelompok Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) dan anggota OPM yang hidup di luar negeri, perlu diselenggarakan sebuah konferensi tersendiri. Konferensi OPM ini sebaiknya diadakan di salah satu negara di Pasifik karena lebih memungkinkan kehadiran banyak peserta. Dalam konferensi ini para tokoh OPM yang berasal dari berbagai faksi perlawanan dan yang biasanya memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat diajak untuk membahas tentang perdamaian dan pembangunan di Tanah Papua. Mereka difasilitasi untuk memfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah real yang dialami oleh orang Papua dan non-Papua. Kemudian, mereka ditantang untuk



membahas dan mendiskusikan tentang solusi-solusi yang realistis dan terukur demi terciptanya Papua sebagai Tanah Damai. Konferensi ini akan membantu para pihak OPM untuk membahas dan merumuskan pendapat kolektif mereka tentang masalah dan solusi-solusi yang diperlukan demi menyelesaikan konflik antara Papua dan Jakarta.

Kelima, dialog formal antara wakil-wakil dari pemerintah dan orang asli Papua atau dialog Jakarta-Papua. Pada tahap ini, dialog berlangsung antara pemerintah pusat dan orang asli Papua yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia yakni OPM. Dalam dialog ini, semua penemuan dan kesimpulan yang ditetapkan dalam konferensi nasional dan konferensi OPM dibahas dan dicari titik persamaan dan perbedaan. Wakil dari pemerintah dapat mempresentasikan tentang hasil konferensi nasional dan wakil dari OPM dapat memaparkan kesepakatan OPM tentang perdamaian dan pembangunan. Selanjutnya kedua belah pihak dapat mendalami, membahas, dan menetapkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Kesepakatan-kesepakatan tersebut menyangkut masalah-masalah dan penyebabnya yang menghidupkan konflik Papua, perubahan-perubahan yang dikehendaki terjadi dalam jangka panjang, serta mekanisme penyelesaian yang partisipatif dan tanpa kekerasan.

Sebuah kesepakatan akan hilang maknanya dan bahkan sia-sia belaka, apabila tidak diimplementasikan secara konsisten. Tercapainya suatu kesepakatan, sekalipun penting, bukanlah akhir dari proses dialog Jakarta-Papua. Tercapainya kesepakatan malah merupakan sebuah titik awal dari perjuangan bersama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai. Kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan secara bersama dalam dialog Jakarta-Papua mesti diimplementasikan di seluruh Tanah Papua. Untuk kepentingan implementasi kesepakatan tersebut, perlu disusun secara bersama suatu rencana-aksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Rencana aksi ini mencerminkan komitmen bersama dari pihak pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk membangun Papua yang damai. Bila diperlukan, dapat dibentuk sebuah lembaga *monitoring* independen yang mengawasi pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan yang telah diambil dalam dialog Jakarta-Papua. Implementasi kesepakatan secara konsisten, menyeluruh, dan efektif, pada gilirannya, akan mengurangi sikap saling mencurigai, serta membangkitkan dan memperkuat sikap saling percaya antara pemerintah Indonesia dan orang Papua pada umumnya dan secara khusus dengan OPM.





## Penutup

Konflik antara pemerintah Indonesia dan orang Papua perlu ditransformasi dari destruktif menjadi konstruktif. Perubahan ini dapat dilaksanakan melalui proses transformasi konflik. Tentu semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses perubahan ini. Keterlibatan mereka dapat dimungkinkan melalui dialog. Sebuah team fasilitator perlu dibentuk guna mengintensifkan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan dalam proses transformasi konflik Papua melalui dialog. Team fasilitator ini terdiri dari team pemerintah pusat yang diangkat oleh wakil presiden dan satu team yang diangkat oleh masyarakat sipil di Tanah Papua. Team gabungan ini diharapkan memfasilitasi dan mengatur tahapan dan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan dalam proses transformasi konflik. Tanpa adanya team fasilitator yang terdiri dari wakil pemerintah pusat dan orang Papua, proses transformasi konflik Papua tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, konflik Papua-Jakarta akan terus berlanjut, kecurigaan dan ketidakpercayaan antara Papua dan Jakarta akan terus berlanjut, berbagai aksi kekerasan akan dilakukan, dan korban terus akan berjatuh. Semuanya ini akan membuat konflik Papua-Jakarta akan semakin kompleks dan sulit dicarikan solusinya.



## Daftar Rujukan

- Forum Akademisi untuk Papua Damai. 2012. *Negosiasi: Noken Dialog untuk Papua Damai*. Jakarta: TIFA, Imparsial, dan Forum Akademisi untuk Papua Damai.
- Lederach, John Paul. 2003. *Conflict Transformation*. Intercourse (PA): Good Books.
- Sarapung, Elga. J. 2013. *100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua*, Yogyakarta: Interfidei.
- Tebay, Neles. 2009. *Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua*, Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Angkat Pena Demi Dialog Papua*, Yogyakarta: Interfidei.
- Tim Imparsial. 2011. *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua*, Jakarta: Imparsial.
- Widjojo, Muridan, S. (ed). 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Jakarta: LIPI.

